

Efektifitas Keberadaan Rumah Potong Hewan di Kota Palopo

Ira Israwati¹, Jaerani²

¹Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin

²Jurusan Agribisnis Ternak Unggas, SMK Negeri 3 Enrekang

email : iraisrawati@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) disuatu daerah memberikan dampak positif baik itu terhadap peternak maupun pemerintah daerah itu sendiri. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas keberadaan RPH di kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2006 di Kota Palopo. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai efektifitas keberadaan rumah potong hewan di Kota Palopo. Metode penelitian yang di gunakan yaitu data *time series* selama 5 tahun terakhir. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan RPH telah efektif berdasarkan data 5 tahun terakhir. Peternak memiliki tempat untuk memotong hewan ternak mereka sedangkan pemerintah mendapatkan retribusi yang tiap tahunnya meningkat dari RPH.

Kata Kunci : Rumah Potong Hewan, Retribusi, Kota Palopo

ABSTRACT

The existence of a slaughterhouse (RPH) in an area has a positive impact on both farmers and the local government itself. Therefore, the purpose of this research is to find out how effective the existence of RPH in Palopo city is. This research was conducted from November to December 2006 in Palopo City. This type of research is a descriptive study that describes or explains the effectiveness of the existence of a slaughterhouse in Palopo City. The research method used is time series data for the last 5 years. The results of the study revealed that the existence of abattoirs had been effective based on the data of the last 5 years. Farmers have a place to slaughter their livestock while the government gets a retribution that increases every year from the abattoir.

Keywords: Slaughterhouse, Retribution, Palopo City

PENDAHULUAN

Aktivitas memelihara ternak di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Dari catatan dan peninggalan sejarah terlihat bahwa sejenak zaman kerajaan dulu sudah ada cikal bakal peternakan. Populer dengan ayam negeri dan itik lokal. Hingga tahun 1970 sebenarnya tidak banyak peternakan yang di andalkan, walaupun sejak tahun 1920-an sudah di temukan beberapa peternakan itik dan ayam buras kala itu oleh pakar peternakan belanda. Bahkan, sejak tahun 1950-an sudah ada yang membuka peternakan

ayam ras galur murni di jawa barat. Tetapi semua itu dapat di katakan sebagai usaha perintis yang tidak memberikan arti secara nasional. Hal ini sebabkan karena periode tersebut kondisi yan tidak memungkinkan (Rasyaf,1995).

Aktivitas-aktivitas pemeliharaan tersebut tentunya didukung oleh Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berada diseluruh daerah di Indonesia. Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mendasari perwujudan otonomi

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah untuk senantiasa meningkatkan kemandiriannya, di antara dalam menyediakan dana baik untuk penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan, di antaranya melalui pendapat asli daerah yang berasal dari Rumah Potong Hewan.

Sumber-sumber pendapatan yang di maksud, di samping lapangan yang sempit dan terbatas, juga pengolaannya sendiri belum terselenggara secara intensif. Potensi-potensi daerah yang ada, belum banyak yang banyak di kembangkan hal ini antara lain di sebabkan kemampuan untuk menggali potensi-potensi tersebut tidak hanya terbatas pada dana operasional saja, tetapi juga tergantung pada kemampuan pejabat yang ada dalam meningkatkan motivasi motivasi masyarakat sehingga upaya peningkatan PAD masih banyak yang belum berdasarkan atas potensi PAD yang riil dimiliki daerah, terutama sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

Kota Palopo merupakan salah satu kota di provinsi di Sulawesi Selatan, dimana retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang di gunakan dalam upaya pembangunan wilayah. Meskipun demikian, pemungutan retribusi daerah Kota Palopo belum efektif dan optimal, khususnya retribusi rumah potong hewan. Hal ini di dasarkan pula pada hasil wawancara terhadap beberapa tenaga pemungut retribusi bahwa masih banyaknya rumah potong hewan liar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana efektifitas keberadaan rumah potong hewan khususnya di Kota Palopo.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan desember 2006 di Kota Palopo. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, suatu jenis penelitian yang melakukan penggambaran atau penjelasan terhadap objek penelitian. Adapun yang di gambarkan atau di jelaskan pada penelitian ini adalah efektifitas keberadaan rumah potong hewan di Kota Palopo. Metode penelitian yang di gunakan yaitu data *time series* selama 5 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografi dan Administrasi Kota Palopo

Kota palopo merupakan salah satu kota di kawasan timur Indonesia tepatnya di propinsi Sulawesi selatan, selain kota Makassar dan Kota Pare-pare, Kota Palopo merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu. Kota palopo terletak dibagian utara Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu, Teluk Bone dan Kabupaten Tana Toraja. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah yang cukup subur. jarak antara Kota Palopo dan ibu kota Sulawesi Selatan, Kota Makassar, yaitu kurang lebih 200 km yang dapat di tempuh sekitar 8 hingga 10 jam. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan antara kota palopo dengan ibu kota Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar.

Kondisi wilayah merupakan salah satu faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Letak dan luas wilayah yang strategis dan mendorong perkembangan pembangunan wilayah yang lebih pesat dan di manfaatkan potensi daerah yang lebih tinggi.

Luas wilayah Kota Palopo yaitu 247,57 Km² dimana kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas yaitu Kecamatan Wara Barat seluas 54 Km² atau sekitar 21,87% sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Watu Utara seluas 10, 58 Km² atau sekitar 4,27% melihat luas wilayah yang dimiliki oleh kota palopo maka dapat di nyatakan bahwa kota ini memiliki potensi lahan yang cukup potensial dalam pengembangan sektor peternakan, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Kependudukan Kota Palopo

Masalah kependudukan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak , baik pemerintah maupun pihak lainnya. Hal ini di sebabkan karena kependudukan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan penanganan penduduk yang tidak maksimal akan menjadi masalah dan penghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, maju mundurnya pembangunan suatu wilayah dapat di lihat dari kondisi penduduk yang dimilikinya.

Jumlah penduduk kota palopo pada berdasarkan hasil survey ekonomi nasional tahun 2005 yaitu sebesar 127.804 jiwa. Jumlah tersebut sebagian besar adalah perempuan sebanyak 63.377 jiwa atau 50,37% dan sisanya adalah laki-laki sebanyak 63.427 jiwa atau sekitar 49,63% sex rasio sebesar 98,52, angka ini menunjukan bilamana terdapat 100 penduduk ada 98-99 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tersebut merupakan salah satu sumber daya manusia yang dimiliki oleh kota palopo.

Salah satu faktor penentu produktivitas kerja seseorang adalah faktor umur. Hal ini di sebabkan pada kelompok umur tertentu seseorang akan mencapai suatu titik produktivitas tertinggi dan selanjutnya akan mengalami penurunan. Tingkat umur penduduk Kota

Palopo berkisar antar 0 sampai 75 tahun. Komposisi penduduk sebagian besar berada pada umur produktif. Jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk yang berumur 5 sampai 9 tahun yaitu sebanyak 16.017 atau sekitar 12,53 %. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia kota palopo masih cukup besar pada masa-masa yang akan datang. Komposisi penduduk kota palopo berdasarkan tingkat umur produktif yaitu sebagian besar penduduk kota palopo berada pada usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak 78.948 jiwa atau 61,77% melihat kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk kota palopo sebagian besar berada pada kondisi produktif atau potensial dalam menciptakan produk maupun jasa.

Luas dan Penggunaan Lahan

Luas wilayah yang dimiliki suatu wilayah merupakan potensi terbesar dalam proses pembangunan. Oleh karena itu maka setiap daerah perlu menggunakan wilayah atau lahan tersebut semaksimal mungkin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi wilayah yang dimiliki suatu wilayah akan mempengaruhi penggunaan lahan wilayah tersebut, sebagai contoh lahan yang terdapat di sekitar laut, umumnya di manfaatkan masyarakat untu usaha tambak demikian pula lahan yang terdapat di daerah perbukitan umumnya di gunakan masyarakat untuk perkebunan.

Data yang didapatkan dari pemerinta Kota Daerah Palopo bahwa penggunaan lahan mayoritas digunakan untuk tambak, kolam dan sawah. Adapun penggunaan lahan tertinggi yaitu untuk tambak sebesar 1.531,00 Ha atau sekitar 90,59% sedangkan untuk kolam hanya sebesar 34,50 Ha atau sekitar 2,04%. Melihat kenyataan tersebut maka dapat di katakan bahwa sub sektor perikanan merupakan sub sektor yang memiliki potensi yang cukup besar di kota palopo.

Untuk pengembangan sub sektor peternakan merupakan upaya untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat serta sebagai upaya pemenuhan permintaan masyarakat terhadap produk hasil peternakan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat yang berdampak pada kesadaran terhadap makanan yang bernilai gizi tinggi. Oleh karena itu pengembangan sub sektor peternakan yaitu melalui peningkatan jenis dan populasi ternak yang ada di setiap daerah.

Jenis ternak yang terdapat di kota palopo yaitu antara lain kebau, sapi, kambing, ayam buras, ayam pedaging, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Adapun jenis ternak dengan populasi tertinggi yaitu ayam buras sebanyak 113.694 ekor dan ternak dengan populasi terendah yaitu kerbau sebanyak 356 ekor. Tingginya populasi ternak ayam buras di sebabkan faktor hampir sebagian besar penduduk di daerah tersebut memelihara ayam buras karna mudah dalam penanganannya.

Efektivitas Keberadaan Rumah Potong Hewan di Kota Palopo

Keberadaan rumah potong hewan di kota palopo tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa pemotongan dan pemeriksaan ternak baik sebelum maupun setelah di potong. Rumah potong hewan di kota palopo umumnya di geluti oleh pihak swasta, sedangkan rumah potong hewan milik pemerintah belum ada.

Aktivitas pemeriksaan kesehatan dan pemotongan ternak pada rumah potong hewan di kota palopo di mulai sejak dini hari sampai dengan subuh sekitar kurang lebih jam 5 pagi. Hal ini di sebabkan karena hasil pemotongan ternak berupa daging, tulang, jeroan, maupun hasil ikutan lainnya tersebut akan di pasarkan pada pagi hari di pasar sentral kota palopo maupun pasar-pasar tradisional lainnya. Jadi hal ini tidak terlepas dari upaya pemenuhan permintaan konsumen rumah tangga maupun konsumen rumah makan yang

mengola daging tersebut pada pagi hari. Adapun jenis ternak yang di potong umumnya ternak sapi bali.

Retribusi rumah potong hewan di pungut pada setiap pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah di potong. Adapun objek retribusi adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi:

- a. Penyewaan kandang
- b. Pemeriksaan kesehatan
- c. Pemakaian tempat pelayan daging
- d. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan

Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan. Retribusi rumah potong hewan di golongan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang di potong. Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif retribusi yang terdapat pada peraturan daerah kota palopo nomor 22 tahun 2004 tentang retribusi rumah potong hewan di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Jenis pelayanan rumah potong hewan yang di kenakan retribusi yaitu pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah di potong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat palayuan daging dan pemakaian angkutan. Adapun besarnya retribusi untuk setiap jenis pelayanan tersebut berbeda untuk setiap jenis ternak, kecuali pada jasa pemakaian angkutan yaitu sebesar Rp. 100,-/kg/km. Target dan realisasi pemungutan retribusi RPH Kota Palopo

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, penerimaan dari

dinas-dinas dan penerimaan lain-lain bagi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan daerah yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan keunagna daerah sehingga akan memberikan tingkat kemampuan dalam pembiayaan pembangunan, sepanjang cara penetapan target penerimaan di lakukan secara professional artinya jumlah target yang di tetapkan sebanding dengan potensi penerimaan sector tersebut.

Target penerimaan retribusi rumah potong hewan menunjukkan besarnya jumlah penerimaan yang di harapkan oleh pemrintah dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan realisasi pemungutan retribusi rumah potong hewan merupakan besarnya penerimaan yang berhasil di peroleh atau di pungut pemerintah dari jasa pelayanan daeri rumah potong hewan yang di nyatakan dalam rupiah pertahun.

Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial, tergantung kepada kemampuan aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutannya, sehingga jumlah retribusi yang di kumpulkan setiap tahunnya dapat meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu di perlukan peraturan-peraturan daerah yang menyangkut pungutan retribusi daerah dapat di efektifkan.

Dalam aktualisasi otonomi daerah, retribusi merupakan salah satu indikator pengukuran kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga setiap daerah berupaya menggali potensi daerahnya sendiri. Penetapan target penerimaan retribusi rumah potong heawan di Kota Palopo yaitu dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu pencapaian pada tahun sebelumnya, dan perkiraan/potensi pemotongan ternak pada tahunyang akan datang serta jumlah RPH yang beroperasi.

Target pemungutan retribusi rumah potong hewan yang akan di tetapkan oleh pemerintah tertinggi pada tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp. 108.800.000,- per tahun sedangkan target

terendah yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp 72.000.000,- hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan besarnya target yang di tetapkan oleh pemerintah pada tahun 2005. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan bahwa pemungutan retribusi tersebut sebelum mencapai target yang di tetapkan, selain itu selama ini penetapan target hanya di dasarkan pada kondisi rumah potong hewan pada menjelang hari-hari raya keagamaan tanpa melihat kondisi rumah potong hewan pada hari-hari biasa. Oleh karena itu perlunya analisis data pemotongan ternak yang lebih akurat , untuk penetapan target yang lebih rasional dan tidak berkesan bersada-ada, hal ini sesuai dengan pendapat Syahrinullah (2006 : 62) bahwa dalam menetapkan target harus jeli dan harus dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan koordinasi, aplikasi dan pengendaliannya sehingga antara realisasi dengan target tidak jauh menyimpan.

Realisasi pemungutan retribusi rumah potong hewan kota palopo selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Penerimaan pemungutan retribusi rumah potong hewan tertinggi yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp 57.085.000 dan penerimaan pemungutan retribusi rumah potong hewan terendah di kota palopo yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp 25.155.000,-. Fluktuasi penerimaan pemungutan retribusi rumah potong hewan tersebut dapat di sebabkan oleh jumlah ternak yang di potong yaitu masih di bawa target yang di tetapkan (200 ekor per hari) sebagai akibat banyaknya daging ternak yang masuk dari daerah lain seperti kabupaten tana toraja serta daging impor, kinerja petugas retribusi rumah potong hewan dimana aktivitas pemotongan di laksanakan pada dini hari sedangkan pemungutan retribusi di lakukan pada pagi hari sehingga kemungkinan data yang di berikan pihak RPH tidak sesuai dengan jumlah ternak di potong, serta kesadaran wajib retribusi dalam

melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini kesadaran dalam melaporkan jumlah ternak yang di potong tersebut.

Penetapan target penerimaa retribusi rumah potong hewan di kota palopo mengalami peningkatan tertinggi pada tahu 2003 dan 2004, dan pada tahun 2005 peneapan target penerimaan retribusi rumah potong hewan tersebut mengalami penurunan. Hal in tidak terlepas realisasi penerimaan pemungutan retribusi pada tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pemungutan retrbusi rumah potong hewan di Kota Palopo selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan, khususya pada tahun 2005. Sedangkan realisasi pemungutan retribusi rumah potong hewan terendah yaitu pada tahun 2003. Hal ini dapat disebabkan oleh kinerja petugas dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan yang masih rendah dalam hal ini belum maksimalnya pengawasan pemotongan yang di lakukan oleh petugas pemungut retribusi dimana petugas tidak terlihat secara langsung jumlah ternak yang di potong akibat pemungutan di lakukan pada pagi hari sedangkan pemotongan di lakukan pada dini hari, serta jumlah ternak yang di potong pada rumah potong hewan masih rendah atau tidak sesuai dengan target yang di tetapkan pemerintah yaitu seekor 200 ekor per hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurmantu (2003 : 33) bahwa kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan retrbusi. Petugas retribusi yang professional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan wajib retribusi. Di samping tingkat intelegensia yang tinggi dan terampil, tenaga retribusi juga harus mempunyai sifat pengabdian dan integritas serta moral yang tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas diketahui bahwa keberadaan Rumah Potong Hewan di Palopo sangat membantu baik itu terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah. Untuk masyarakat sendiri RPH memberikan bantuan terhadap ketersediaan protein hewani. Sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri, keberadaan RPH memberikan kontribusi berupa retribusi yang akan meningkatkan PAD pemerintah daerah.

Saran

Sebaiknya RPH yang ada di Kota Palopo dijaga dengan baik dengan memberikan fasilitas yang cukup kepada peternak yang menggunakan RPH tersebut sebagai timbal balik penarikan retribusi penggunaan RPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2002). *Penggemukan Sapi Potong*. Agromedia Pustaka, Jakarta
- Hafied, H. (2005). Efektifitas Pemungutan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene. Penelitian Pendapatan Daerah Kabupaten Majene. Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Majene Bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI).
- Kurniawan, P dan Purwanto, A. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Granit, Jakarta.

- Rasyaf, M. (1995). *Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samudra, A.A. (2005). *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Hecca Publishing, Jakarta.
- Siahaan, M.P. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syahrinullah. (2006). *Efektifitas Pemungutan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.